

Masih Banyak Jalan Rusak, Kabupaten Bekasi Tambah Anggaran Infrastruktur

BEKASI (IM) - DPRD Kabupaten Bekasi mendorong agar anggaran infrastruktur di Kabupaten Bekasi ditambah. Pasalnya masih banyak ruas jalan di Kabupaten Bekasi yang kondisinya rusak.

Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Baddarudin Nooreza Holik Qodratullah mengatakan, anggaran infrastruktur harus menjadi prioritas. Untuk itu pihaknya kini akan turut menyusun anggaran tambahan agar perbaikan jalan berjalan lebih masif.

"Kami akan membuat skala prioritas pada titik-titik jalan rusak yang kita kunjungi ini. Kalau pun ada keterbatasan dana kami nanti memilah-milah seefektif mungkin supaya pembangunannya bisa terealisasi," kata Holik usai meninjau langsung kondisi jalan di sejumlah wilayah di Kabupaten Bekasi pada Kamis (25/5).

Holik menuturkannya, hari ini ada delapan titik jalan rusak yang ditinjau yakni, di Kecamatan Serangbaru, Bojongsung, Cibitung, dan Cikarang Barat. DPRD, lanjut dia, terjun ke lapangan setelah banyak keluhan warga terkait kondisi jalan di Kabupaten Bekasi.

Dalam beberapa keluhan, kondisi jalan di Kabupaten Bekasi bah-

kan kerap dikaitkan dengan isu infrastruktur di Lampung. "Infrastruktur merupakan sektor fundamental yang harus mendapat penanganan serius," tuturnya.

Sementara itu Sekda Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi menambahkan, pihaknya bakal menyusun anggaran untuk menambah alokasi pembangunan. Selain pada APBD Perubahan 2023, penambahan pun akan disusun untuk APBD 2024.

Sedangkan Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi, Henri Lincoln menerangkan, alokasi perbaikan jalan pada APBD 2023 mencapai Rp300 miliar. Anggaran itu sudah mulai dilakukan untuk merealisasikan pembangunan. Kendati demikian, jumlah tersebut masih belum mencukupi untuk perbaikan menyeluruh. Henri meyakini inisiatif penambahan anggaran dari legislatif dapat menambah jumlah jalan yang diperbaiki.

"Idealnya itu ada penambahan anggaran 30% dari APBD ini. Jumlah itu sudah cukup baik untuk di anggaran perubahan nanti. Kemudian di 2024 juga perlu penambahan agar pembangunan bisa jauh lebih maksimal lagi," ucapnya. ● yan

Warga Menolak, Dishub DKI Pastikan U-turn Antasari Tak Akan Ditutup Lagi

JAKARTA (IM) - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta memastikan akses putar balik (*u-turn*) di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan, tidak akan ditutup kembali. Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo berujar, penutupan tak akan dilakukan karena warga sempat menolak saat u-turn di Jalan Pangeran Antasari ditutup beberapa waktu lalu.

"Yang di Antasari, mengingat ada penolakan dari warga, kami tidak laksanakan terlebih dahulu," sebutnya kepada awak media, Kamis (25/5).

Syafrin sekaligus mengoreksi pernyataan pejabat Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan yang menyatakan akan kembali menutup putaran balik itu. Dishub DKI, kata Syafrin,

kini hendak mengevaluasi kondisi lalu lintas di Jalan Pangeran Antasari. Evaluasi dilakukan untuk mencari solusi atas kemacetan di Jalan Pangeran Antasari.

Ia mengakui, Jalan Pangeran Antasari kerap dipadati kendaraan bermotor saat pagi hari. Sebab, menurut Syafrin, pengendara kendaraan roda empat langsung turun di Jalan Pangeran Antasari setelah keluar dari Tol Desari. "Kami akan evaluasi dulu terkait kondisi *traffic* di sana sambil dicari alternatif untuk mengurangi kepadatan di jalan yang akan ke Antasari," tuturnya.

"Kan kita pahami, dengan adanya Tol Besar, pada pagi hari, itu yang dari tol langsung numpuk di depan simpang Antasari," lanjut dia. ● yan

Gubernur New South Wales Temui Heru, Ungkap Rencana ke Australia Tahun Ini

JAKARTA (IM) - Gubernur New South Wales, Margaret Joan Beazly menemui Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (25/5). Setelah pertemuan itu, Heru Budi mengungkapkan rencana kunjungannya ke New South Wales, Australia.

"Iya (hendak mengunjungi) New South Wales. Bulan Oktober (2023), penyajian budaya Jakarta," ujar Heru di Balai Kota DKI, Kamis. Ia mengungkapkan, New South Wales memang merupakan sister city Jakarta. Sister city adalah bentuk kerja sama antar-daerah di dua negara yang berbeda. Bentuk kerja sama kedua daerah bisa berupa pertukaran pelajar, promosi kebudayaan, hingga peningkatan perekonomian.

Heru mengaku memba-

has beberapa hal, di antaranya, yakni tentang pendidikan dan ekonomi kreatif.

"(Ada) pertemuan, (tentang) kerja sama pendidikan, tourism, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM," ujar Heru.

Kepala Biro Kerja Sama Daerah Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Marulina Dewi Mutiara berujar, kunjungan Gubernur New South Wales juga merupakan salah satu langkah transisi Jakarta menjadi kota bisnis, usai tak lagi menjadi Ibu Kota Negara.

"Ini bagian dari transisi Jakarta sebagai kota bisnis secara global," ungkapnya di lokasi yang sama. "Jadi, banyak program-program global yang kami kerja sama kan juga dengan negara-negara yang sudah menjadi sister city dengan Jakarta," lanjut Marulina. ● yan

4 | Metropolis

FOTO: ANTARA



POSKO PELAYANAN PPDB DI JAKARTA

Sejumlah petugas (kiri) memberikan penjelasan kepada orang tua calon peserta didik terkait pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Posko Pelayanan PPDB SMA Negeri 70, Jakarta Selatan, Kamis (25/5). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka posko layanan PPDB 2023 mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang kesulitan mengakses laman tahapan pendaftaran.

Pemkot Jakut Tawarkan Warga Eks Kampung Bayam Tinggal Sementara di Rusun

Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim mengatakan, pihaknya telah menawarkan rusun untuk ditempati warga Rusun Kampung Bayam yang belum memiliki tempat tinggal. Namun tawaran tersebut belum mendapat respon positif dari warga.

JAKARTA (IM) - Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara telah menyiapkan tempat tinggal sementara bagi warga Rusun Kampung Bayam. Warga Kampung Bayam merupakan warga masyarakat yang terdampak pembangunan stadion Jakarta International Stadium (JIS). Hunian yang disiapkan sebagai tempat tinggal sementara salah satunya Rusun Nagrak di Cilincing, Wali Kota

ujarnya, Kamis (25/5).

Ali menjelaskan, warga Kampung Bayam yang bersedia direlokasi ke rusun alternatif nantinya bisa kembali menempati Rusun Kampung Bayam dengan mengikuti ketentuan. Ada beberapa rusun yang masih kosong di wilayah Jakarta Utara, salah satunya Rusun Nagrak yang sebelumnya digunakan untuk isolasi pasien covid-19.

Sejauh ini, pihaknya telah berupaya maksimal memberikan solusi terkait permasalahan ini dan tinggal menunggu respon dari warga.

"Saya berharap akan muncul respon baik atas solusi yang telah kita berikan," tandasnya.

Seperti diketahui, warga Kampung Bayam enggan tinggal di rusun yang dibangun PT Jakarta Propertindo.

Mereka menolak menempati rusun karena harga sewa hunian tersebut dianggap mahal. Terlebih warga calon penghuni rusun tersebut rata-rata berpenghasilan rendah.

Tuntutan Warga

Sementara itu, Persaudaraan Warga Kampung Bayam (PWKB) melayangkan surat keberatan administratif atas tindakan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan Pj Gubernur DKI Jakarta, beserta jajaran Pemprov DKI Jakarta yang tidak kunjung melakukan pemulihan hak 75 warga Kampung Bayam.

Para korban penggusuran itu menagih hak unit dan pengelolaan Kampung Susun Bayam sebagaimana telah dijanjikan sebelumnya. Pengacara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DKI Jakarta, Jihan Fauziah Hamdi menilai, hal ini telah melanggar hak atas tempat tinggal yang layak, peraturan perundang-undangan, dan asas-asas umum

pemerintahan yang baik.

"Dengan tidak ditanggapinya serta dilakukannya tuntutan pada keberatan administratif tersebut, menunjukkan kegagalan Jakpro dan Pemprov DKI Jakarta dalam memenuhi hak atas tempat tinggal yang layak," kata Jihan, Kamis (16/3) lalu.

Dalam surat keberatan itu, PWKB menyampaikan beberapa poin penting yang tertuang di dalam Surat Banding Administratif yakni tindakan Pemprov DKI Jakarta dan Jakpro telah melanggar hukum, yaitu telah menyalahi Kepgub 878/2018, Kepgub 979/2022 dan Pergub 90/2018, yang menjadi dasar dilakukannya pelaksanaan penataan kampung di mana Gubernur DKI Jakarta sebagai pemberi mandat memiliki tanggung jawab utama memastikan mekanisme penataan kampung tersebut terlaksana sebagaimana mestinya, serta mampu memenuhi hak atas tempat tinggal yang layak. ● yan

Dishub Jawab Soal Maraknya Videotron yang Dianggap Ganggu Pengguna Jalan

JAKARTA (IM) - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan akan melakukan pengecekan terhadap videotron yang dianggap mengganggu pengendara.

"Pencahayaannya selama dia tidak mengganggu, itu silakan saja dipasang gitu kan. Nah ini yang tentu harus dilihat lagi seberapa kuat pencahayaannya itu sehingga pengemudi kemudian masih merasa terganggu oleh keberadaan videotron," ujar Syafrin.

Lebih lanjut, Syafrin menjelaskan bahwa pihaknya memang menyampaikan kepada penyelenggara tentang tingkat pencahayaan videotron yang sangat terang juga dianggap merekah karena mengganggu pengemudi kendaraan yang melintas.

ada aturan yang membatasi jumlah videotron yang dipasang di DKI. Ia pun mempersilakan penyelenggara memasang videotron, asal tetap memperhatikan tingkat pencahayaannya.

"Untuk videotron memang kami sudah menyampaikan kepada penyelenggara bahwa tingkat pencahayaannya itu harus diukur agar tidak menimbulkan gangguan tadi, yakni mengganggu pengemudi sehingga konsentrasi dalam mengemudi itu hilang, jadi terganggu," ungkapnya.

Keluhan masyarakat tentang pencahayaan videotron di Jakarta ini diunggah dalam akun Twitter @PartaiSocmed. Dalam akun tersebut, pengunggah mempertanyakan izin dari videotron yang semakin menjamur di wilayah Jakarta. Selain itu, cahaya dari videotron yang sangat terang juga dianggap merekah karena mengganggu pengemudi kendaraan yang melintas.

"Untuk videotron memang kami sudah menyampaikan kepada penyelenggara bahwa tingkat pencahayaannya itu harus diukur agar tidak menimbulkan gangguan tadi, yakni mengganggu pengemudi sehingga konsentrasi dalam mengemudi itu hilang, jadi terganggu," ungkapnya.

Keluhan masyarakat tentang pencahayaan videotron di Jakarta ini diunggah dalam akun Twitter @PartaiSocmed. Dalam akun tersebut, pengunggah mempertanyakan izin dari videotron yang semakin menjamur di wilayah Jakarta. Selain itu, cahaya dari videotron yang sangat terang juga dianggap merekah karena mengganggu pengemudi kendaraan yang melintas.

FOTO: ANTARA



DANI RAMDAN KEMBALI JADI PJ BUPATI BEKASI

PJ Bupati Kabupaten Bekasi Dani Ramdan berjalan keluar ruangan usai melakukan serah terima berkas surat keputusan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat, Kamis (25/5). Dalam serah terima surat keputusan yang dikeluarkan oleh Mendagri tersebut Dani Ramdan kembali menjadi PJ Bupati Kabupaten Bekasi hingga 18 Mei 2024.

Dani Ramdan Ditunjuk Lagi Jadi Pj Bupati Bekasi

BANDUNG (IM) - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penjabat (Pj) Bupati Bekasi untuk Dani Ramdan di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (25/5).

Dalam kesempatan itu, Ridwan berpesan kepada Dani untuk fokus menjaga kondusivitas masyarakat jelang tahun politik.

"Saya minta fokus pada menjaga kondusivitas karena situasi politik nasional sudah menghangat mungkin sedikit memanas. Saya harap Kabupaten Bekasi menjadi percontohan agar rutinitas demokrasi lima tahunan di tahun depan ini berjalan dengan lancar," paparnya.

Emil, sapaan akrab Gubernur Jabar, juga meminta Dani untuk terus menggenjot program strategis seperti memperluas lapangan kerja dan meningkatkan infrastruktur.

"Jadi fokus saja pada hal produktif seperti

membangun jalan, mengurangi pengangguran agar warga Bekasi bisa masuk industri tidak hanya jadi penonton," jelasnya.

Sementara itu, terkait perpanjangan tugas jabatan Pj Bupati Bekasi, Ridwan Kamil menyebut hal itu keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Penunjukan Dani Ramdan, kata Ridwan, sudah melalui pertimbangan matang. Ia juga mengatakan, pergantian kursi kepemimpinan dalam waktu singkat cenderung tidak efisien dalam menjalankan pemerintahan.

"Banyak pergantian dalam pandangan kami akan selalu ada namanya proses beradaptasi dan itu akan menghabiskan energi, waktu, proses pembangunan, jika banyak mengalami perlambatan kebijakan," tuturnya.

Sebelumnya, Dani Ramdan dilantik sebagai Pj Bupati Bekasi pada 22 Mei 2022 lalu menggantikan Akhmad Marjuki. ● yan

mandiri PENGUMUMAN

Telah dilakukan Pengalihan Piutang dan atau Cessie PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, pada tanggal 25 Mei 2023 dengan keterangan sebagai berikut:

- Nama Debitur Andi Paga.
- Nilai Pengalihan Piutang (Cessie) sebesar Rp. 430.462.194.00.
- Cessionaris a.n. Ir. H. Rohidin yang bertempat tinggal di Jl. MPR 1 Dalam RT. 001, RW. 011, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka tmt. 25 Mei 2023 seluruh kewajiban hutang kredit atas nama Andi Paga telah beralih kepada pihak ketiga sebagaimana disebutkan pada butir 3 diatas.

PT Bank Mandiri (Persero),Tbk.
Regional Retail Collection & Recovery Jakarta 2

mandiri PENGUMUMAN

Telah dilakukan Pengalihan Piutang dan atau Cessie PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, pada tanggal 25 Mei 2023 dengan keterangan sebagai berikut:

- Nama Debitur Asja / PD. Bumi Putera.
- Nilai Pengalihan Piutang (Cessie) sebesar Rp. 396.996.376.00.
- Cessionaris a.n. Muhamad Nur Alam yang bertempat tinggal di Jl. Raya Hankam RT 001 / 002, Kel. Ceger, Kec. Cipayung, Jakarta Timur.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka tmt. 25 Mei 2023 seluruh kewajiban hutang kredit atas nama Asja / PD. Bumi Putera telah beralih kepada pihak ketiga sebagaimana disebutkan pada butir 3 diatas.

PT Bank Mandiri (Persero),Tbk.
Regional Retail Collection & Recovery Jakarta 2